BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di jabarkan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan klinis merupakan kewenangan yang telah ditetapkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan berkordinasi dengan Konsil sebagai lembaga yang berhak untuk mengawasi praktik kedokteran, kewenangan klinis yang diberikan pada dokter adalah kewenangan yang telah sesuai dengan kompetensi dan keahlian seorang dokter dibidang tertentu. Namun dalam praktiknya dokter dapat melakukan tindakan medis di luar kewenangan klinisnya dengan beberapa kondisi tertentu meliputi: tindakan medis dalam kondisi normal, tindakan medis dalam kondisi khusus yaitu Ketiadaan dokter dalam tempat fasilitas pelayan kesehatan daerah tertentu, kondisi luar biasa (Wabah dan/atau bencana) dan kebutuhan program pemerintah, kondisi gawat darurat. Maka dokter dalam melaksanakan tindakan medis dalam kondisi-kondisi tersebut dokter harus dan telah memiliki SIP, memiliki surat tugas dari pemerintah daerah sebagai tanda resmi untuk melakukan tindakan medis di luar kewenangan klinis dokter. Yang dimana surat tugas ini diartikan mempunyai kedudukan yang sama dengan SIP dan memiliki hak dan kewajiban yang sama.
2. Melaksanakan praktik kedokteran harus berpedoman pada disiplin profesi dokter sebagai ketentuan yang harus dijalani dalam melakukan tindakan medis, dalam menetapkan disiplin profesi dokter adalah menteri dan konsil

maka dalam membantu untuk memantau kewenangan klinis dokter ada lembaga yang bernama Majelis Disiplin Kedokteran Indonesia (MDKI) yang menjadi lembaga untuk menegakan disiplin profesi dokter yang berdasarkan dengan ketentuan disiplin dokter. Dokter dalam melakukan tindakan medis yang di luar kewenangan klinis tidak berpedoman pada ketentuan disiplin profesi. Maka di dalam sanksi yang dijatuhkan dalam kondisi normal Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksana UU Kesehatan dapat dikenakan sanksi administrasi yang berupa, teguran lisan, teguran tertulis, sanksi administrasi, dan bahkan sampai pencabutan izin. Dalam kondisi khusus dapat dijatuhkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan pembatasan praktik. Dan terakhir dalam kondisi gawat darurat maka dokter tidak dapat dijatuhkan sanksi administrasi, bahkan sebaliknya apabila seorang dokter tidak melakukan pertolongan pertama pada penanganan gawat darurat melanggar sikap disiplin kedokteran dan dijatuhkan sanksi pidana. Yang akan dikenakan langsung oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dengan mekanisme yang telah tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksana UU Kesehatan.

B. Saran

1. Tindakan medis di luar kewenangan klinis yang dilakukan oleh dokter harus memperhatikan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik yang berpedoman pada UU Kesehatan, dan seharusnya pemerintah dapat melakukan pengawasan yang dimana pengawasan ini dilaksanakan sedang

berlangsungnya dokter melakukan tindakan medis. Agar dapat meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran kewenangan klinis atau hak-hak pasien dalam kondisi apapun.

2. Dalam menerapkan ketentuan sanksi administrasi kepada dokter, sanksi yang ditetapkan harus sesuai dengan peristiwa. Maka pemberlakuan sanksi administrasi dapat diterapkan sesuai dengan peraturan kesehatan.